

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

TUGAS AKHIR PERIODE 147



“Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo”

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Arsitektur*

Disusun Oleh :

INGGRID FRANSISKA RIWU UNA - 21020115120064

Dosen Koordinator :

Ir. Budi Sudarwanto, M.Si

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Ir. Wijayanti, M. Eng

2. Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT

Dosen Penguji :

Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT

Prodi S1 Departemen Teknik Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Kota Semarang

2019

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua yang bersumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 04 Juli 2019



Ingrid Fransiska Riwu Una
21020115120064

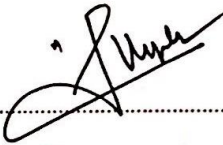
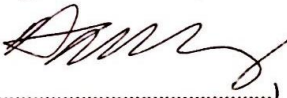
HALAMAN PENGESAHAN

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini diajukan oleh :

Nama : Ingrid Fransiska Riwu Una
NIM : 21020115120064
Departemen/Program Study : Arsitektur / Sarjana (S1)
Judul Tugas Akhir : Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana / S1 pada Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

TIM DOSEN

Pembimbing I	: Dr. Ir. Wijayanti, M. Eng NIP. 196307111990012001	 (.....)
Pembimbing II	: Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT NIP. 196312311990031022	 (.....)
Pengjiu I	: Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT NIP. 197306161999031001	 (.....)

Ketua Departemen Arsitektur


Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT.
NIP. 196704041998022001

Semarang, 04 Juli 2019

Ketua Program Studi S1 Arsitektur


Dr. Ir. Erni Setyowati, MT
NIP. 196310201991021001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ingrid Fransiska Riwu Una

NIM : 21020115120064

Departemen/Program Study : Arsitektur / Sarjana (S1)

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*None Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

PERANCANGAN BALAI PERSINGGAHAN SOSIAL MARGO WIDODO

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 04 Juli 2019

Yang menyatakan,



Ingrid Fransiska Riwu Una

21020115120064

ABSTRAK

Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo

Oleh :Inggrid Fransiska Riwu Una, Wijayanti, Agung Budi Sardjono

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah menjadi salah satu kunci tercapainya kesejahteraan sosial. Ketika Negara tidak dapat melindungi kesejahteraan sosial warganya, secara tidak langsung masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat aktifitas sosial mereka. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang yang karena suatu hambatan, kesulitan/gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun. Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk mengurangi angka penyakit sosial masyarakat dan meminimalisir PMKS untuk kembali ke jalan melalui proses rehabilitasi, pemberdayaan dan pemanfaatan.

Perkembangan LKS muncul pada tahun 1960 dan diperkuat dengan terbentuknya UU No. 11 Tahun 2009 untuk menjamin keberlangsungan LKS dan standarisasi layanan dan sarana-prasarana LKS yang tercatat pada Permensos No. 22 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi standar umum dalam pelaksanaan LKS dan harus disesuaikan dengan jenis PMKS yang dimanfaatkan. Generalisasi sarana prasarana sering terjadi pada beberapa LKS di Indonesia. Hal ini terlihat pada Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo sebagai LKS untuk penanganan PMKS di Jawa Tengah. Pada awal terbangunnya, balai ini difungsikan sebagai panti rehabilitasi jiwa dan selanjutnya menjadi Balai PMKS (2018). Perubahan fungsi dan layanan pada balai tentu harus disesuaikan dengan perubahan fasilitas dan sarana-prasarana pada balai.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah rancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo yang ideal dan sesuai dengan fungsi bangunan saat ini menggunakan pendekatan *therapeutic Healing Architecture*.

Kata Kunci :Kesejahteraan Sosial, PMKS, Balai Sosial, Sarana Prasarana, *Therapeutic Healing Architecture*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan LP3A Tugas Akhir Periode 147 dengan judul ***Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo***. Penyusunan LP3A ini untuk memenuhi laporan dalam mata kuliah Tugas Akhir dan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Arsitektur. Penyusunan laporan LP3A ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Ir. Wijayanti, M.Eng selaku dosen pembimbing utama.
- Bapak Ir. Budi Sudarwanto, MSi; selaku dosen koordinator.
- Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT; selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT; selaku Ketua Program Studi S1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT; selaku dosen pembimbing kedua dalam tugas akhir ini, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penyelesaian LP3A.
- Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.T. selaku dosen penguji, yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian LP3A ini.
- Orang Tua Saya, Ayub Riwu dan Yuliana T. Tangkesalu yang selalu mendukung dan doa, serta Kak Ika, Kak Ima dan Lus yang selalu memberi semangat selama pengerjaan Laporan.
- Kak Innes, Kak Togar, Maria Eva , teman-teman tossiarrang, teman-teman dasar dan teman-teman keluarga minus yang selalu menghibur saya dalam pengerjaan Laporan.
- Seluruh mahasiswa Arsitektur terkhususnya angkatan 2015 atas segala support yang telah diberikan
- Mas-mas Grab dan Gojek yang menemani mobilitas saya dalam proses pengerjaan laporan.
- Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam laporan ini terkandung materi yang kurang berkenan atau mengandung kesalahan yang tidak disengaja. Penulis berharap semoga LP3A ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa arsitektur yang ingin mempelajari Perencanaan dan Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo, serta bermanfaat kepada masyarakat umum.

Semarang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	2
1.2.1. Tujuan.....	2
1.2.2. Sasaran	2
1.3. Manfaat.....	2
1.3.1. Subyektif	3
1.3.2. Obyektif.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.4.1. Lingkup Substansial	3
1.4.2. Lingkup Parsial	3
1.5. Metode Pembahasan.....	3
1.5.1. Metode Deskriptif.....	3
1.5.2. Wawancara	3
1.5.3. Metode Dokumentatif	4
1.5.4. Metode Komparatif	4
1.6. Sistematika Pembahasan	4
1.7. Alur Pikir.....	5
BAB II	7
2.1. Tinjauan Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	7
2.1.1. Defenisi Lembaga Kesejahteraan Sosial	7
2.1.2. Latar Belakang Lembaga Kesejahteraan Sosial.....	7
2.1.4. Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	8
2.2. Tinjauan Umum Panti Sosial	11
2.2.1. Defenisi Panti Sosial.....	11
2.2.2. Standar pelayanan Panti Sosial	11

2.3.	Tinjauan Umum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15
2.3.1.	Defenisi Penyandang Masalah Sosial	15
2.3.2.	Kriteria PMKS	15
2.4.	PMKS pada Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	16
2.4.1.	Klasifikasi PMKS pada Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	16
2.4.2.	Analisa Kondisi dan Pedoman untuk PMKS	20
2.5.	Pendekatan dan Pedoman Pelayanan PMKS	21
2.5.1.	<i>Healing Achitecture</i> dengan Konsep Therapeutic Space	22
2.5.2.	Pedoman Perancangan Fasilitas Untuk Kesehatan Mental	25
2.5.3.	Universal Desain	27
2.6.	Studi Banding	30
2.6.1.	Panti Pelayanan Sosial "PGOT" Mardi Utomo Semarang	30
2.6.2.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring, Kendal	35
2.6.3.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "Ngudi Rahayu" Kendal	38
2.6.4.	Tabel Analisis Studi Banding	42
2.6.5.	Kesimpulan Analisa	45
BAB III		47
3.1.	Tinjauan Umum Kota Semarang	47
3.1.1.	Letak Geografis	47
3.1.2.	Kebijakan Penataan Ruang Kota Semarang	49
3.1.3.	Rencana Pembagian Wilayah Kota	49
3.1.4.	Peraturan Daerah Mengenai Fasilitas Umum	50
3.2.	Tinjauan Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo	53
3.2.1.	Gambaran Umum Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	53
3.2.2.	Visi dan Misi	54
3.2.3.	Sarana dan Prasarana	54
3.2.4.	Tinjauan Proses Pelayanan	56
3.2.5.	Tinjauan Sumber Daya, Organisasi dan Manajemen	57
3.2.6.	Tinjauan Program	57
3.2.7.	Tinjauan Kemitraan	59
3.3.	Kesimpulan	59
3.4.	Batasan	59
3.5.	Anggapan	60
BAB IV		61
4.1.	Pendekatan Aspek Fungsional	61

4.1.1.	Pendekatan Kegiatan	61
4.1.2.		63
4.1.3.	Pendekatan Pelaku dan Aktifitas	63
4.1.4.	Pendekatan Kebutuhan Ruang.....	71
4.1.5.	Pendekatan Kapasitas Pengguna	76
4.1.6.	Pendekatan Kapasitas Ruang	78
4.1.7.	Pendekatan Besaran Ruang.....	82
4.1.8.	Pendekatan Sirkulasi	92
4.1.9.	Pola Hubungan Antar Ruang	94
4.2.	Pendekatan Aspek Kontekstual	94
4.2.1.	Informasi Umum Tapak	95
4.2.2.	Alasan Pemilihan Tapak.....	95
4.3.	Pendekatan Aspek Kinerja.....	96
4.3.1.	Sistem Pencahayaan	96
4.3.2.	Sistem Penghawaan.....	96
4.3.3.	Utilitas	97
4.4.	Pendekatan Aspek Teknis.....	99
4.4.1.	Struktur Bawah	99
4.4.2.	Struktur Tengah	99
4.4.3.	Struktur Atas	100
4.4.4.	Pagar pelindung luar.....	100
4.5.	Pendekatan Desain	100
BAB V		101
5.1.	Program Dasar Perencana	101
5.1.1.	Program Ruang	101
5.1.2.	Aspek Kontekstual	105
5.2.	Program Dasar Perencanaan	105
5.2.1.	Aspek Kinerja	105
5.2.2.	Aspek Teknis	106
5.2.3.	Aspek Arsitektural	107
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Pelayanan Rumah Singgah	13
Gambar 2. 2 Panti berbentuk asrama (Panti Wreda Harapan Ibu, Ngaliyan)	14
Gambar 2. 3 Panti berbentuk asrama (Balai Persinggahan Soisal Margo Widodo)	14
Gambar 2. 4 Panti berbentuk Cottage (Balai Persinggahn Sosial Margo Widodo)	15
Gambar 2. 5 Ilustrasi Care in the Community	22
Gambar 2. 6 Ilustrasi Design for Domesticity	23
Gambar 2. 7 Ilustrasi Social Valorisation	23
Gambar 2. 8 Signages	23
Gambar 2. 9 Pintu Otomatis	28
Gambar 2. 10 Desain Gunting bagi Pengguna Tangan Kanan dan Kiri	28
Gambar 2. 11 Intruksi dengan Menggunakan Gambar	28
Gambar 2. 12 Penerapan Aspek Peraba, Pengelihatn dan Pendengaran pada Alat Ukur	29
Gambar 2. 13 Opsi 'Undo' pada Komputer	29
Gambar 2. 14 Implikasi Level handle pada Pintu	29
Gambar 2. 15 Locket Karcis Stasiun yang Dapat Mengakomodasi Pengguna Berkebutuhan Khusus	30
Gambar 2. 16. Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial "PGOT" Mardi Utomo	31
Gambar 2. 17 Tampak Depan rumah pelayanan Panti	32
Gambar 2. 18 Lingkungan rumah pelayanan Panti	32
Gambar 2. 19 TPA/Aula	32
Gambar 2. 20 Pos Satpam	32
Gambar 2. 21 Koperasi	32
Gambar 2. 22 Taman Wisata	33
Gambar 2. 23 Ruang Anak	33
Gambar 2. 24 Taman Rusa	33
Gambar 2. 25 Ruang Jahit	33
Gambar 2. 26 Lapangan Olahraga	33
Gambar 2. 27 R. Bimbingan pertukangan kayu	34
Gambar 2. 28 Musholla	34
Gambar 2. 29 Ruang Pendidikan	34
Gambar 2. 30 Ruang Las dan Tata Boga	34
Gambar 2. 31 Area Jemur	34
Gambar 2. 32 Parkir	34
Gambar 2. 33 MCK	34
Gambar 2. 34 Kantor	34
Gambar 2. 35 Dapur Utama	34
Gambar 2. 36 Poliklinik	35
Gambar 2. 37 Lahan Pertanian	35
Gambar 2. 38. Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Lansia Cepiring	36
Gambar 2. 39 Gedung Kantor	37
Gambar 2. 40 Asrama	37
Gambar 2. 41 Poliklinik	37
Gambar 2. 42 Musholla	37
Gambar 2. 43 Ruang Makan	37
Gambar 2. 44 Ruang Isolasi	37
Gambar 2. 45 Ruang Pamulasaraan	37
Gambar 2. 46 Gedung Serbaguna	37
Gambar 2. 47 Pos Satpam	38
Gambar 2. 48 Area Jemur	38
Gambar 2. 49 Parkir	38

Gambar 2. 50 Lapangan	38
Gambar 2. 51 Kebun.....	38
Gambar 2. 52. Struktur Organisasi PPS Mental "Ngudi Rahayu" Kendal	39
Gambar 2. 53 Gedung Kantor.....	41
Gambar 2. 54 Musholla	41
Gambar 2. 55 Ruang Konsultasi	41
Gambar 2. 56 Musholla	41
Gambar 2. 57 Ruang Keterampilan	41
Gambar 2. 58 Parkir.....	41
Gambar 2. 59 Gazebo	41
Gambar 2. 60 Ruang Makan	41
Gambar 2. 61 Rumah Dinas.....	42
Gambar 2. 62 Kebun.....	42
Gambar 2. 63 Asrama.....	42
Gambar 2. 64 Ruang Isolasi	42
Gambar 2. 65 Taman	42
Gambar 2. 66 Lapangan	42
Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang	48
Gambar 3. 2 Peta Tata Guna Lahan Kota Semarang	48
Gambar 3. 3 Tujuh Unit Wisma Penerima Manfaat untuk kapasitas 170 Orang	54
Gambar 3. 4 Rumah Dinas	54
Gambar 3. 5 Musholla	55
Gambar 3. 6 Aula	55
Gambar 3. 7 Ruang Keterampilan	55
Gambar 3. 8 Poliklinik.....	55
Gambar 3. 9 Dapur Umum	55
Gambar 3. 10 Lapangan Olahraga	55
Gambar 3. 11 kantor	55
Gambar 3. 12 Lahan Berkebun.....	55
Gambar 3. 13 Gudang	56
Gambar 3. 14 Ruang Isolasi	56
Gambar 3. 15 Pos Satpam	56
Gambar 3. 16 kantor	56
Gambar 3. 17 Patkir.....	56
Gambar 3. 18 Lahan Pertanian.....	56
Gambar 3. 19 Struktur Organisasi Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	57
Gambar 5. 1 Lokasi Balai	105

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Jenis Pelayanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	8
Tabel II. 2. Klasifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.....	9
Tabel II. 3. Tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial.....	9
Tabel II. 4. Bentuk Pelayanan dan Jumlah Penerima Manfaat.....	10
Tabel II. 5. Tugas, Posisi, dan Fungsi SDM di LKS.....	10
Tabel II. 6. Standar Minimum Sarana Prasarana pada Panti Sosial.....	11
Tabel II. 7. Tabel Pelayanan Kebutuhan Dasar pada Panti Sosial.....	12
Tabel II. 8. Tabel Kondisi PMKS dan Pendekatan yang Harus Diperhatikan.....	20
Tabel II. 9. Tabel Panduan Perencanaan Unit Mental.....	25
Tabel II. 10. SDM Kesejahteraan Sosial PPS "PGOT" Mardi Utomo	30
Tabel II. 11. SDM Kesejahteraan Sosial PPS "PGOT" Mardi Utomo	35
Tabel II. 12. SDM Kesejahteraan Sosial PPS "PGOT" Mardi Utomo	39
Tabel II. 13 Tabel Komparasi Analisis Hasil Studi Banding	42
Tabel II. 14 Tabel Komparasi Analisis Sarana Parasaran Studi Banding dengan Standar Minimum Sarana Prasarana pada Panti Sosial	44
Tabel II. 15 Tabel Kesimpulan Analisa Hasil Studi Banding	45
Tabel III. 1 Arahan Ketinggian Bangunan (Jumlah Lantai).....	53
Tabel III. 2 Jadwal Pelayanan Sosial Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo.....	57
Tabel IV. 1 Jadwal Pelayanan Sosial Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo.....	63
Tabel IV. 2 Pendekatan Aktifitas Penerima Manfaat.....	64
Tabel IV. 3 Pendekatan aktifitas Pengunjung.....	66
Tabel IV. 4 Pendekatan Aktifitas Pekerja Sosial Fungsional	67
Tabel IV. 5 Pendekatan Aktifitas Kelompok Diagnostik dan Konsultasi	68
Tabel IV. 6 Pendekatan aktifitas Pengelola Balai.....	68
Tabel IV. 7 Pendekatan Aktifitas Kelompok Pengelola Asrama.....	70
Tabel IV. 8 Pendekatan Aktifitas Servis	70
Tabel IV. 9 Tabel Pendekatan Pelaku dan Aktifitas	71
Tabel IV. 10 Perbandingan jumlah Penerima Manfaat Panti Tipe A di Jawa Tengah.....	76
Tabel IV. 11 SDM Kesejahteraan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	78
Tabel IV. 12 Tabel Pendekatan Besaran Ruang	82
Tabel IV. 13 Kriteria Pemilihan Tapak.....	95
Tabel V. 1 Program Ruang Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU no 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah menjadi salah satu kunci tercapainya kesejahteraan sosial, dengan memberikan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 tahun 2009 pasal 1 ayat 2). Kesejahteraan sosial sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun orang usia lanjut, penderita cacat fisik ataupun mental, korban bencana alam dan korban bencana sosial (PerDa 06 tahun 2010 mengenai Kesejahteraan sosial).

Ketika Negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelindung kesejahteraan sosial, secara tidak langsung masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat aktifitas sosial mereka. Seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Sosial (PerMenSos) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam PerMenSos ini, PMKS dibagi menjadi 26 dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memudahkan proses pendataan dan pelayanan PMKS.

Upaya penanganan PMKS akan berjalan dengan efektif jika adanya sinergitas yang baik antara pemerintah, Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), lembaga kesejahteraan sosial (LKS), hingga masyarakat. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah untuk menangani PMKS seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk mengurangi angka penyakit sosial masyarakat dan meminimalisir pelaku PMKS untuk kembali ke jalan melalui proses rehabilitasi, pemberdayaan dan pemanfaatan PMKS.

Perkembangan LKS sendiri telah muncul sejak tahun 1960 setelah penjajahan Indonesia oleh Belanda. Permasalahan sosial yang terjadi pasca kemerdekaan menyebabkan kepala dinas sosial saat itu mulai membentuk lembaga-lembaga pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan terbentuknya UU No 6 Tahun 1967 (sekarang menjadi UU No. 11 Tahun 2009) untuk menjamin keberlangsungan LKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk menyempurnakan pelayanan LKS, dibentuklah standarisasi layanan dan sarana prasarana pada pelayanan masalah sosial yang tercatum pada Permensos No. 22 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi standar umum dalam pelaksanaan pelayanan pada LKS dan harus disesuaikan dengan jenis PMKS yang dimanfaatkan. Penyesuaian ini dalam bentuk penambahan fasilitas khusus seperti penerapan konsep *Universal Design* pada difabel, *therapeutic space* pada korban NAPZA dan lain-lain sehingga tidak terjadi generalisasi sarana prasarana sehingga pemanfaatan PMKS dapat berjalan dengan baik.

Kondisi generalisasi sarana prasarana ini terlihat pada sebuah Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo sebagai satu-satunya LKS untuk penanganan PMKS di Jawa Tengah. Pada awal